

BAB I

PENDAHULUAN

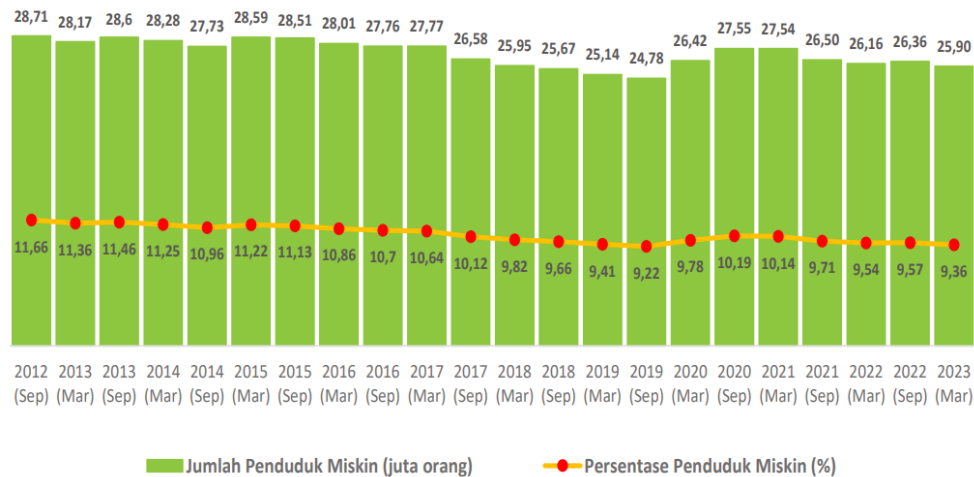
1.1. Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia termasuk dalam masalah krusial yang perlu diutamakan mengingat dampaknya yang sangat besar seperti pengangguran, angka kematian dan ketimpangan sosial. Problematika kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan akses ekonomi, lingkungan, budaya, politik dan partisipasi masyarakat, oleh karena itu kemiskinan disebut sebagai permasalahan yang sifatnya kompleks dan multidimensional (Sari & Larasati, 2020). Dewasa ini, kemiskinan dianggap sebagai bentuk kegagalan bagi suatu negara dalam mensejahterakan dan memenuhi hak warganya. Artinya apabila tingkat kemiskinan di suatu negara tinggi maka tingkat kesejahteraan di negara tersebut terbilang rendah.

Pada negara maju, masalah kemiskinan berkaitan dengan kualitas hidup serta pengembangan industri, namun di negara berkembang cenderung terkait pendapatan yang tidak merata (Noorikhshan & Gunawan, 2022). Jumlah populasi penduduk yang tinggi berdampak pada meningkatnya kemiskinan penduduk di Indonesia, apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan akan sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Berdasarkan informasi dari World Population Review, pada 2022 Indonesia menempati posisi 73 dari 100 negara termiskin di dunia, data ini diukur dari pendapatan nasional bruto per kapita (GNI). Artinya kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Berikut grafik mengenai kemiskinan di Indonesia selama 11 tahun terakhir (2012-2023).

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2023



Sumber : Data Diolah dari Badan Pusat Statistik, 2023

Grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia terbilang belum stabil, setiap tahunnya terjadi penurunan dan peningkatan jumlah penduduk miskin yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada 2012 dengan total 28,71 juta orang dan jumlah terendah berada di tahun 2019 dengan total 24,78 juta orang. Secara keseluruhan kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya masih berada di atas angka 25 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih perlu digalakkan.

Semarang merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia sekaligus ibu kota dari provinsi Jawa Tengah. Sebagai kota besar, Semarang menjadi salah satu dari kelima daerah dengan penduduk tertinggi di Jawa Tengah.

Semarang menempati posisi keempat setelah Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas dengan total jumlah penduduk sebanyak 1.659.975 jiwa pada tahun 2022. Kepadatan penduduk ini tentu berdampak baik negatif maupun positif bagi Semarang, salah satu dampak yang tidak bisa dihindarkan adalah kemiskinan.

Semarang menduduki tingkat tertinggi sebagai kota dengan persentase kemiskinan yang rendah. Kondisi ini menunjukkan kondisi Kota Semarang dimana hanya sebagian penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meski menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin terendah, namun masih ada ketimpangan antara masyarakat pendapatan tinggi dan masyarakat pendapatan rendah. Banyak kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat yang sama dari pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk miskin di Semarang tergolong tinggi dibandingkan kota besar lain di Jawa Tengah.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin di 6 Kota Besar Provinsi Jawa Tengah 2015-2023

Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	10,90	10,60	10,60	9,60	9,10	9,60	9,44	8,65	7,45
Kota Surakarta	55,70	55,90	54,90	47,00	45,20	47,03	48,78	45,94	43,89
Kota Salatiga	10,60	9,70	9,60	9,20	9,20	9,69	10,14	9,45	9,41
Kota Semarang	84,30	83,60	80,90	73,60	72,00	79,58	84,45	79,87	80,53
Kota Pekalongan	24,10	23,60	22,50	20,50	20,20	22,16	84,45	79,87	80,53
Kota Tegal	20,30	20,30	20,10	19,40	18,60	19,55	20,27	19,78	19,22

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dibandingkan kota besar lain di Jawa Tengah, Kota Semarang menduduki kota nomor satu dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Semarang yang merasakan ketimpangan pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar berjumlah besar. Hal ini sangat disayangkan mengingat Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah sekaligus pusat pemerintahan dan ekonomi (Nova et al., 2023) yang seharusnya memberikan manfaat kemudahan masyarakatnya dalam bekerja dan mencukupi kebutuhan hidupnya.

Menanggapi isu ini, Pemkot Semarang menggandeng seluruh *stakeholder* dalam pembentukan program desa wisata. Desa wisata menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Semarang untuk menurunkan tingkat kemiskinan terutama di wilayah pedesaan. Pembentukan desa wisata dilakukan dengan memanfaatkan potensi daya tarik wisata daerah baik alam, budaya maupun buatan manusia yang akan diberikan dukungan, akomodasi dan fasilitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan luar daerah (Ramadhan, 2023). Konsep desa wisata tengah menjadi sorotan pemerintah Indonesia, dibuktikan dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang menekankan pemberdayaan desa melalui program desa wisata dengan target 2000 desa wisata di seluruh Indonesia. Desa wisata ini merupakan tempat kepariwisataan berbasis potensi desa dengan berbagai keunikan dan daya tarik yang akan diberdayakan menjadi sebuah produk wisata (Gayatri et al., 2020).

Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang perekonomian di Kota Semarang. Sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah, Semarang menjadi salah satu

destinasi kunjungan wisatawan dengan beberapa daya tarik wisata seperti alam, religi, budaya, wisata buatan, minat khusus dll. Potensi wisata di berbagai daerah Semarang berhasil menarik minat wisatawan untuk berkunjung sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan Kota Semarang pada sektor wisata setiap tahunnya. Berikut jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Semarang setiap tahun.

Tabel 1.2

Jumlah Wisatawan di Kota Semarang 2017-2022

Tahun	Jumlah Wisatawan	
	Nusantara	Mancanegara
2017	4.198.584	99.282
2018	5.703.282	66.107
2019	7,150,343	81,999
2020	252.839	388
2021	2.670.281	77
2022	3,640,591	2,355

Sumber : Data Diolah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah (2017-2022)

Jumlah wisatawan di Kota Semarang ini menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah. Namun, adanya pandemi covid-19 tahun 2020 memberi dampak besar bagi Kota Semarang berupa penurunan signifikan jumlah wisatawan yang datang baik lokal maupun mancanegara. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan di berbagai negara sehingga menghambat adanya alur mudik wisata pada tahun yang bersangkutan. Namun, pasca pandemi sektor pariwisata dan jumlah wisatawan di Kota Semarang juga mulai pulih dan

mengalami kenaikan. Penurunan dan peningkatan jumlah wisatawan juga berdampak pada penurunan dan peningkatan pendapatan daerah, tidak terkecuali Kota Semarang. Berikut total pendapatan sektor wisata di Kota Semarang

Tabel 1.3

Total Pendapatan Sektor Wisata di Kota Semarang 2017-2022

Tahun	Pendapatan Sektor Wisata
2017	29.076.280.548
2018	30.351.402.892
2019	43,080,114,117
2020	2.817.333.700
2021	18.214.155.033
2022	3,956,089,886

Sumber : Data Diolah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah (2017-2022)

Pendapatan sektor wisata di Kota Semarang menyumbang cukup besar dari pendapatan di Kota Semarang, peningkatan pendapatan secara signifikan dapat berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pendapatan di sektor wisata ini bersumber dari wisata alam, budaya, wisata buatan, wisata sesuai minat, maupun dari desa wisata. Konsep desa wisata memiliki keunikan tersendiri karena menawarkan kearifan lokal dan keaslian pedesaan dengan kehidupan ekonomi, sosial budaya, adat istiadat dan keseharian serta arsitektur tata ruang desa yang khas. Kegiatan ekonomi yang ditawarkan sifatnya unik karena berangkat dari lokal kultural masyarakat seperti kuliner, atraksi, akomodasi, cinderamata, keahlian khusus dll (Mariana et al., 2022). Kawasan desa wisata ini juga menyediakan

fasilitas guna menunjang kebutuhan dan kenyamanan pengunjung serta berbagai penawaran menarik lain misalnya penginapan.

Tabel 1.4

Desa Wisata di Kota Semarang

Kecamatan	Desa	Potensi Desa Wisata
Gunung Pati	Cepoko	Kebun Buah
Gunung Pati	Jatirejo	Kuliner Kolang-kaling dan <i>River Tubing</i>
Gunung Pati	Kandri	Wisata Perahu
Gunung Pati	Nongkosawit	Omah Pang
Mijen	Kedungpane	Curug Gondoriyo
Mijen	Wonolopo	Edukasi Bahasa Inggris
Tugurejo	Tugurejo	Mangrove

Sumber : Website SiKenang Kota Semarang

Kota Semarang saat ini memiliki 7 desa wisata dengan beragam potensi yang berbeda. Mayoritas desa wisata ini sudah terbentuk bahkan sebelum adanya pandemi covid-19, namun terdapat beberapa desa wisata yang berkembang dengan cepat, dan beberapa lainnya lambat atau bahkan tidak berlanjut lagi. Penetapan ketujuh daerah ini menjadi desa wisata telah dipertimbangkan dan disesuaikan dengan potensi dari masing-masing daerah serta kesanggupan masyarakat daerah tersebut untuk diberdayakan. Desa Jatirejo dengan potensi kuliner kolang-kaling menjadi salah satu desa wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Hal ini karena Jatirejo memiliki keunggulan sebagai sentra kolang-kaling terbesar di Semarang.

Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo dilandasi oleh regulasi yaitu Surat Keputusan Walikota Semarang No. 556/819 tahun 2017 tentang Penetapan Desa Wisata Kota Semarang. Desa Jatirejo juga memiliki kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yaitu Pokdarwis Jatilanggeng. Pengembangan desa wisata Jatirejo dinaungi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dimana Desa Jatirejo menjadi desa wisata binaan. Jatirejo dianggap memenuhi syarat untuk dikembangkan sebagai desa wisata binaan yaitu berlokasi wilayah yang berada di pelosok desa, memiliki kepadatan penduduk yang rendah, memiliki tingkat pendidikan rendah, memiliki potensi wisata dan memiliki keunikan pada wilayah tersebut dimana masyarakat dapat mengolah kolang-kaling sebagai sumber pendapatan mereka (Maulina & Suheri, 2020). Desa Wisata Jatirejo secara resmi disahkan pada tahun 2017 oleh Walikota Semarang.

Desa wisata Jatirejo didirikan sejak 2017, namun sampai saat ini desa ini masih menjadi desa wisata rintisan di Semarang. Dalam pengembangannya, belum ada peningkatan yang maksimal. Hal ini dianggap sebagai suatu permasalahan karena letak desa wisata Jatirejo berdekatan dengan beragam wisata lain seperti Desa Wisata Kandri, Desa Wisata Wonolopo, Waduk Jatibarang, dan Goa Kreo. Artinya, desa wisata Jatirejo ini memiliki wisata penunjang agar berkembang seperti wisata sekitarnya, namun nyatanya desa wisata Jatirejo ini masih kurang dikenal masyarakat (Gunawan, Sari, et al., 2022).

Tabel 1.5

Daya Tarik Desa Wisata Jatirejo

Jenis Daya Tarik	Keterangan	Pengelola
Pengelolaan Kolang-kaling	Warga lokal Jatirejo mengkreasikan kolang-kaling yang mereka produksi sendiri menjadi berbagai produk pangan antara lain manisan, kerupuk, tahu isi, selai, gulali, dan brownies kolang-kaling.	Pokdarwis dan Organisasi Desa Wisata
Eduwisata Susu Perah / GFF	Daya tarik berupa peternakan dengan puluhan sapi, menyediakan produk olahan sapi serta edukasi perawatan terkait peternakan sapi	Pokdarwis dan Organisasi Desa Wisata
Bumi Perkemahan	Bumi perkemahan yang memiliki luas lahan kurang lebih 5 Ha dikelola oleh Disperkim dengan menyediakan fasilitas penunjang kegiatan perkemahan seperti taman bermain, toilet, dan pendopo.	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang
Kampung Cabai Merah (KAMBERA)	Menyediakan produk wisata berupa edukasi penanamn cabai merah serta produk bubuk cabai	Pokdarwis dan Organisasi Desa Wisata
Kampung Jahe Merah (KAJERA)	Edukasi wisata penanaman dan perawatan jahe merah	Pokdarwis dan Organisasi Desa Wisata

Sumber: Analisis Penulis dan Penelitian Terdahulu oleh (Maulina & Suheri, 2020)

Pengembangan daya tarik di desa Jatirejo ini masih menemui berbagai permasalahan. Mengutip penelitian mengenai pengembangan desa wisata jatirejo oleh (Jannata et al., 2023) menyatakan bahwa belum optimalnya pengelolaan desa

wisata disebabkan karena lemahnya koordinasi antar stakeholders pariwisata. Terbentuknya pokdarwis di Jatirejo memungkinkan desa wisata ini menerapkan konsep pengembangan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, terdapat permasalahan dimana belum ada peningkatan yang maksimal pada desa wisata Jatirejo. Mengutip penelitian yang dilakukan oleh (D. P. Putri & Suminar, 2023) mengenai pemberdayaan masyarakat di desa wisata Jatirejo terlihat bahwa semakin bertambahnya tahun, pengelolaan desa wisata dengan daya tarik kolang-kaling, jahe merah dan cabe merah dapat dikatakan belum optimal dan masih perlu mendapat perhatian lebih bagi pemerintah maupun stakeholders lain. Ketidakefektifan pengelolaan ini menyebabkan penurunan jumlah wisata yang berkunjung karena minimnya minat dan pengetahuan wisatawan sehingga Desa Wisata Jatirejo belum bisa mendapat perhatian dari masyarakat luas.

Tabel 1.6
Jumlah Kunjungan Desa Wisata Jatirejo

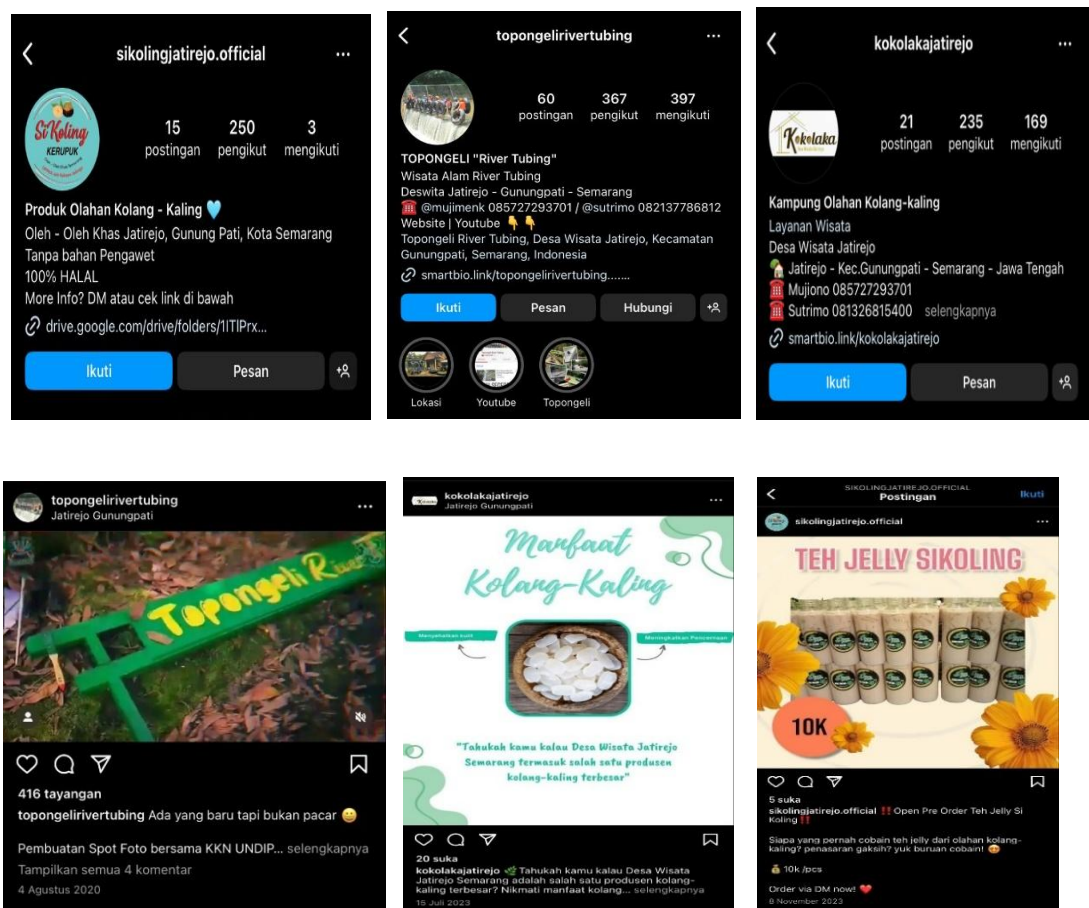
Tahun	Bulan	Jumlah Kunjungan
2022	Desember	114
2023	Januari	130
2023	Februari	39

Sumber : Data Penelitian Terdahulu oleh (D. P. Putri & Suminar, 2023)

Permasalahan lain yang ditemukan pada pengelolaan desa wisata ini terletak pada efektivitas dan efisiensi proses pemberdayaan yaitu minimnya promosi yang dilakukan oleh pengelola sehingga desa wisata kurang dikenal masyarakat luas. Sebelum pandemi, Desa Wisata Jatirejo ini sering mendapat kunjungan masyarakat. Namun akibat pandemi, jumlah wisatawan menurun drastis dan sulit untuk mengalami kenaikan kembali pasca pandemi. Salah satu faktornya adalah kurang gencarnya promosi yang dilakukan di Jatirejo.

Pihak pengelola Jatirejo memang sudah memiliki sosial media untuk ajang promosi, namun belum dimanfaatkan dengan baik. Terdapat 3 sosial media yang dimiliki desa wisata Jatirejo. Namun, ketiga sosial media ini terbilang kurang aktif memposting foto atau video promosi, mereka terakhir kali mempromosikan produk pada 20 Juli 2023 di akun instagram @kokolakajatrejo, 8 November 2023 di akun instagram @sikolingjatrejo.official, dan 4 Agustus 2020 di akun instangram @topongelirivertubing.

Gambar 1.2 Akun instagram Desa Wisata Jatirejo

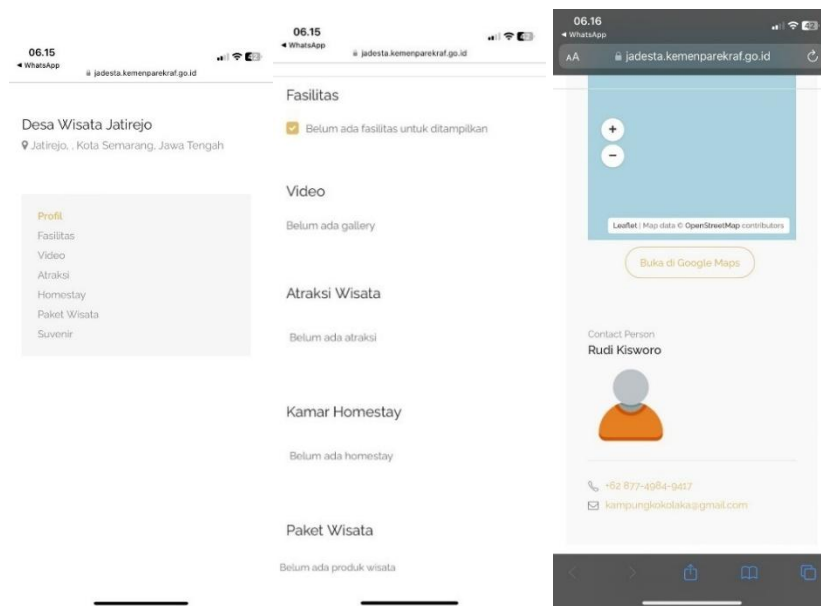


Sumber : Instagram

Selain permasalahan promosi sosial media, desa Jatirejo juga tidak aktif dalam melakukan promosi di website desa wisata atau “jadesta” yang disediakan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa platform pendataan profil dan analisis penentuan klasifikasi desa wisata. Hal ini sangat disayangkan mengingat website ini kerap digunakan wisatawan untuk melihat potensi desa wisata di berbagai daerah di Indonesia.

Gambar 1.3 Website Jadesta



Sumber : Website Jadesta

Desa Wisata Jatirejo tidak melakukan pengisian tentang fasilitas, video, atraksi wisata, kamar homestay, paket wisata, souvenir, bahkan profil Desa Wisata Jatirejopun dibiarkan kosong. Ketidakaktifan media promosi ini berpengaruh pada produk desa wisata Jatirejo yang kurang dilirik oleh masyarakat. Pasalnya, promosi dan pemasaran desa wisata menjadi faktor kunci pengembangan desa wisata sehingga berhasil menarik perhatian wisatawan. Kompetitifnya dunia pariwisata mengharuskan setiap desa wisata untuk kreatif dan mampu bersaing agar jumlah wisatawan stabil bahkan meningkat (Admindesa, 2023). Perkembangan era digital

menuntut desa wisata untuk bisa mempromosikan dan memasarkan daya tarik wisata melalui website atau sosial media yang informatif, menarik dan mudah dinavigasi sehingga menghasilkan pengalaman virtual tentang desa tersebut.

Berkaca pada Desa Wisata Kandri yang berada tidak jauh dari Desa Jatirejo, memiliki sistem promosi sosial media yang aktif bahkan kerap kali melakukan kerjasama promosi dengan dinas pariwisata, hal ini menghasilkan dampak positif dimana Desa Kandri lebih dikenal dan menarik di mata pengunjung, wisatawan yang datang di Desa Kandri ini cenderung stabil sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian warga setempat. Desa wisata Kandri bahkan sudah mendapat predikat sebagai desa wisata maju, sedangkan Desa Wisata Jatirejo masih mendapat predikat rintisan. Hal ini menjadi salah satu masalah karena sejak 6 tahun diresmikan dengan berbagai potensi yang tidak kalah menarik, Jatirejo bahkan belum mampu meraih predikat berkembang.

Selain promosi, permasalahan program pemberdayaan masyarakat di desa Jatirejo ini terlihat pada sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Dilansir dari radarsemarang.jawapos.id (2022) Musfiyati selaku lurah Jatirejo menyatakan bahwa wilayahnya berpotensi menjadi desa wisata unggulan, namun pihaknya masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan sarana prasarana untuk menunjang kemajuan desa wisata, misalnya permainan anak-anak maupun swafoto. Dilansir dari kedaipena.com (2019) Lurah Jatirejo menyatakan bahwa beberapa masyarakat daerah Jatirejo ini belum mengenyam pendidikan tinggi di tahun tersebut sehingga pelatihan desa wisata dari pemerintah sangat diperlukan untuk

menggugah dan menambah semangat warga karena sumber daya manusia pariwisata di Jatirejo ini terbilang kurang.

Permasalahan serupa mengenai SDM ini juga terbukti melalui penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Jannata et al., 2023) yang mendapatkan hasil bahwa belum optimalnya pengelolaan Desa Wisata Jatirejo berasal dari indikator sumber daya manusia yaitu masyarakatnya sendiri yang memang kurang minat dan keseriusan untuk mengelola pariwisata, akibatnya pariwisata di Jatirejo kurang terintegrasi dan terkesan individualis. Unsur kesatuan masyarakat dibawah pokdarwis terbilang kurang. Desa Jatirejo bahkan belum melakukan restrukturisasi dan reorganisasi, karang taruna di Jatirejo juga masih kurang solid dan kurang profesional. Permasalahan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah lemahnya koordinasi antar stakeholders pariwisata guna sinkronasi dan harmonisasi dalam pembangunan dan pengembangan urusan kepariwisataan di desa Jatirejo.

Komoditas lain yang ada di Jatirejo adalah banyaknya tumbuhan pisang yang kurang dimanfaatkan dengan maksimal karena tidak dijadikan tanaman pisang yang berkualitas untuk dijual (Mariana et al., 2022). Hal ini mengakibatkan potensi yang ada di Jatirejo kurang dimaksimalkan karena hanya berfokus pada beberapa daya tarik wisata yang sebelumnya sudah ada, tanpa diberi inovasi baru yang bisa menarik wisatawan.

Desa Wisata Jatirejo dengan produk unggulan kolang-kaling membuat warga lokal mengkreasikan kolang-kaling sebagai produk pangan seperti manisan, kerupuk, tahu isi, selai, gulali, dan brownies kolang-kaling. Salah satu produk

unggulan dari Kokolaka adalah manisan kolang-kaling “Si Manis Koling” yang bertekstur lembur degan rasa manis atau legit. Sebelum adanya pandemi, banyak wisatawan yang datang ke Jatirejo untuk melihat proses pembuatan kolang-kaling secara langsung, namun akibat pandemi terjadi penurunan jumlah pengunjung dan pembeli secara signifikan (Gunawan, Febriyanti, et al., 2022). Pasca pandemi, Jatirejo mengalami kesulitan untuk bangkit dan mendapat banyak pengunjung kembali sehingga pemberdayaan masyarakat di Jatirejo tidak kunjung berkembang lagi.

Mengutip dari penelitian (Gunawan, Febriyanti, et al., 2022), permasalahan yang ditemui terkait daya tarik kolang-kaling adalah keterbatasan pengolahan. Pengolahan di Jatirejo masih terbatas pengolahan yang menghasilkan produk makanan, meskipun sudah ada penelitian mengenai kandungan bioaktif kolang-kaling yang berefek pada kesehatan dengan kandungan gizi yang tinggi. Keterbatasan pengelolaan ini menekan potensi terpendam dari kolang-kaling sebagai hasil produksi lokal Jatirejo. Dilansir dari suaramerdeka.com (2022). Musfiyati SH sebagai lurah Jatirejo menyatakan bahwa usaha kolang-kaling di Jatirejo memang dijalankan warga sejak zaman nenek moyang secara turun temurun, namun permasalahannya ada pada hasil produk yang kurang bervariasi. Lurah Jatirejo juga menyatakan perlunya para warga Jatirejo untuk mendapat pelatihan tentang berbagai macam olahan kolang-kaling dan cara permasalahannya agar usaha kolang-kaling ini bisa berkembang dan lebih menarik di mata masyarakat luas.

Berangkat dari permasalahan ini, peneliti kemudian ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang evaluasi pelaksanaan program pengembangan desa

wisata Jatirejo. Desa wisata ini perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebab ketidakefektifan pengelolaan dan pelaksanaannya. Penelitian tentang evaluasi pelaksanaan ini juga diharapkan dapat menemukan faktor penghambat dari pelaksanaan pengembangan desa wisata Jatirejo Kecamatan Gunungpati. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pengelola Desa Wisata Jatirejo serta Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan program-program prioritas seperti program desa wisata. Evaluasi terhadap program ini diperlukan agar tujuan pembentukan program dapat terealisasi dengan baik. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Wisata Jatirejo Kecamatan Gunungpati”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan desa wisata di Desa Jatirejo. Adapun pertanyaan penelitian yang diangkat adalah “Bagaimana evaluasi pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Jatirejo di Kecamatan Gunungpati”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, adapun identifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Program Desa Wisata Jatirejo sudah berjalan cukup lama sejak diresmikan namun sampai saat ini masih berada ditahap rintisan
2. Pengelolaan dalam aspek keselarasan antar stakeholders masih lemah
3. Infrastruktur dan fasilitas desa yang dirasa kurang memadai
4. Minimnya kapasitas kelembagaan yang mengelola desa wisata Jatirejo
5. Jumlah pengunjung wisata yang kerap mengalami penurunan

6. Promosi potensi wisata Jatirejo yang dinilai tidak efektif

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Jatirejo di Kecamatan Gunungpati?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Jatirejo di Kecamatan Gunungpati?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Jatirejo di Kecamatan Gunungpati
2. Menganalisis faktor penghambat program pengembangan Desa Wisata Jatirejo di Kecamatan Gunungpati

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai bahan rekomendasi bagi instansi yang bersangkutan terkait perbaikan pelaksanaan program-program pemerintah, serta bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program.

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan teoritis sebagai bahan masukan bagi para peneliti kedepannya yang ingin melakukan penelitian

dengan topik evaluasi pelaksanaan program desa wisata serta dapat berkontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang teori evaluasi dan menjadi referensi pembelajaran bagi ilmu administrasi publik.

1.6. Kerangka Teoritis

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Taufik Yuyun & Santi Sriharyati. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Bagi Masyarakat Rendah (MBR) di Berpenghasilan Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran	Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran	Teori evaluasi menurut Dunn (2000) dengan indikator indikator dan tolok ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsibilitas, dan ketepatan	Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sangat membantu, jelas sangat efektif untuk penuntasan rumah tidak layak huni, hal ini ditunjukan bahwa skor rata-rata dari evaluasi pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar 3,84 yang berarti tinggi/setuju dan pemerintah daerahpun tidak lelah berhenti untuk mengusulkan program ini
2.	Ardian Lisa & Didwan. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Praktek	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan context, input, process, product program praktik kerja industri di	Teori evaluasi model CIPP dengan indikator context, input, process, product	Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (Mixed Methods) dengan desain urutan pembuktian	Tingkat ketercapaian program prakerin pada variabel context program prakerin di SMK Negeri 6 Bungo sebesar 93,99% dengan kategori sangat baik. Variabel input program prakerin di SMK Negeri 6 Bungo sebesar 91,52% dengan kategori sangat baik. Variabel process program prakerin di SMK Negeri 6

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
	Kerja Industri (Prakerin)	SMK Negeri 6 Bungo		(Sequential Explanatory).	Bungo sebesar 97,62% dengan kategori sangat baik. Variabel product program prakerin di SMK Negeri 6 Bungo sebesar 78,80% dengan kategori baik. Tujuan prakerin di SMK Negeri 6 Bungo belum sepenuhnya tercapai, strategi pelaksanaan, prosedur penempatan siswa penjadwalan prakerin telah dilaksanakan sesuai prosedur dan komunikasi dengan DU/DI ditingkatkan.
3.	Sumarni et al.,(2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Adiwiyata Di Sma Negeri 7 Wajo	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang relevan dengan pelaksanaan program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Wajo.	Teori evaluasi CIPP dengan indikator context, input, process, product	Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan komponen context memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, komponen input membuat anggaran yang digunakan, komponen proses membuat pemeliharaan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan, serta komponen produk menunjuk dukungan sumber daya manusia dan prasarana merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Adiwiyata, sedangkan Faktor penghambatnya adalah kesadaran dan pemahaman sipir yang fluktuatif tentang pengaruh lingkungan dalam kehidupan sehari-hari

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
4.	Narwastu et al.,(2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bank Sampah Di Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bank sampah yang ada di Kelurahan Pedurungan Kidul beserta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhinya	Teori evaluasi William Dunn dengan indikator indikator dan tolok ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsibilitas, dan ketepatan	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif-komparatif dengan jenis data kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bank Sampah belum terlaksana secara optimal. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul meliputi aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang, dan komunikasi.
5.	Arif Rahman. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Penanggulangan Kemiskinan Di	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dalam implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) penanggulangan	Teori Evaluasi William N. Dunn dengan 6 indikator yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) berperan dalam menyediakan modal usaha bagi masyarakat Kecamatan Kilo dan mampu memberdayakan masyarakat pesisir. Ukuran keberhasilan dari implementasi PEMP di Kecamatan Kilo apabila dilakukan sosialisasi dan implementasi yang massive, tidak hanya di

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
	Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu	kemiskinan di Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu			Kecamatan Kilo, tetapi juga sampai ke desa- desa lainnya
6.	Murtiari et al.,(2024). Evaluasi Pelaksanaan E- Report Kurikulum Mandiri di SD Ngasinan Kabupaten Semarang.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau mengevaluasi penggunaan E- Report Kurikulum Mandiri di SD Ngasinan Kabupaten Semarang.	Teori Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek input pada bidang perencanaan, sumber daya manusia, pembiayaan. dan infrastruktur secara umum sudah sesuai, namun perlu adanya perbaikan di beberapa bidang. Aspek proses meliputi prosedur pra pelaksanaan, pelaksanaan, pengelolaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pembiayaan sesuai pedoman. Aspek produk meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, informasi yang akurat dan terkini, akuntabilitas, efisiensi, kemudahan, dan pelaporan baik dalam format cetak maupun digital. Faktor pendorongnya antara lain kolaborasi, kesadaran, kenyamanan, motivasi, transparansi, infrastruktur, pembiayaan, dan efisiensi. Faktor penghambatnya antara lain kurangnya infrastruktur, konektivitas internet, keterampilan, dan sistem
7.	Fajria Resti et al.,(2023).	Penelitian ini bertujuan untuk	Teori evaluasi Bridgman dan Davis	Metode deksriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSOTS dapat diterapkan pada konteks maternitas di

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
	Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman	mendesripsikan evaluasi pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman dengan lokus di Nagari Katapiang	dengan 4 indikator yaitu input, proses, output, outcomes		Australia dan mendukung triase dan perawatan perempuan yang tepat waktu. Kerangka terstruktur membantu bidan melakukan triase secara efektif. Namun, perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan untuk memastikan konsistensi dalam alur layanan bagi perempuan
8.	Sonia Pwrmata Sari.,(2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang	Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang	Teori evaluasi program Brigman and Davis dengan undukator input, proses, output dan outcome	Metode diskriptif kualitatif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat kendala yang menyebabkan pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit tidak berjalan dengan efektif, program belum ampu meningkatkan kapasitas kebutuhan air bersih masyarakat di RE 02 Kelurahan Lambung Bukit, dampak positif program belum dirasakan oleh masyarakat.
9.	Hamdi Syukrul et al. (2020).	Penelitian ini bertujuan untuk	Teori evaluasi dengan pendekatan	Metode penelitian campuran yaitu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP secara keseluruhan berjalan

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
	Evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Sekolah Kejuruan	mengevaluasi program penyaluran dana pendidikan, Program Indinena Pontar (PIP), untuk sekolah kejuruan (kolab menengah kejurusan atau SMK)	mix method. Model evaluasi yang digunakan adalah model CIPP yang mencakup konteks, input, proses, dan produk	kualitatif dan kuantitatif	baik dengan rincian pada aspek: (a) konteks, sosialisasi PIP terlaksana dengan baik, kinerja tujuan PIP berada pada kategori sangat baik dan dapat meringankan biaya siswa dalam kategori sangat baik, (b) input, pihak sekolah menyediakan tenaga khusus pelaksana PIP yang menunjukkan kategori sangat baik, (c) proses, ketepatan sasaran sebagian besar siswa PIP di SMK menyatakan mengikuti ketentuan. Berdasarkan peran dan fungsi pengelolaan PIP SMK, lembaga telah menjalankan tugasnya dengan baik, (d) produk, sebagian besar permasalahan yang dilaporkan mengenai dana PIP untuk SAMK menunjukkan bahwa penggunaan dana oleh siswa sesuai dengan peorisi dan pengelolaan
10.	Made N D Andayana. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan PKH tahun 2023 melalui evaluasi kebijakan pemerintah. Penelitian ini	Teori evaluasi Dunn dengan 5 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, ketepatan, kecukupan, responsivitas	Metode deskriptif kualitatif	Temuan menunjukkan bahwa PKH di Desa Lasiana telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Indikatornya antara lain (1) efektivitas dilihat dari peserta menjaga komitmen dan kewajiban tema, (2) masyarakat menerima respon dari program, (3) efisiensi dilihat dari efisiennya proses pencairan yang sudah berjalan kecukupan belum berjalan

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
	Pengentasan Kemiskinan	mewawancarai 12 informan dengan kriteria sekretaris kecamatan, pendamping PKH, dan penerima PKH			dengan baik karena bantuan yang diterima masyarakat terkadang habis sebelum waktunya (5) ketepatan sudah tepat karena penentuan peserta melalui banyak tahapan
11.	Lohman, Diederik, et al. (2024). "An implementation evaluation of the Breaking Down human rights barriers to HIV services initiative in Ukraine"	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dari program pengobatan dan pencegahan HIV di Ukraina	Teori evaluasi pelaksanaan program dari Balasubramanian et al dengan 3 tahapan yaitu pengumpulan data pengambilan keputusan operasional dari organisasi pelaksana, pengumpulan data tujuan pelaksanaan, serta menilai faktor kontekstual multilevel	Metode deskriptif kualitatif	Temuan menunjukkann bahwa ada delapan intervensi berbasis hak terkait HIV mencakup program-program menghilangkan stigma dan diskriminasi, menjamin penyediaan layanan kesehatan yang non-diskriminatif, mendorong praktik penegakan hukum berbasis hak, memperluas literasi hukum, meningkatkan akses terhadap keadilan; memperbaiki undang-undang, peraturan dan kebijakan, mengurangi diskriminasi gender, dan memobilisasi masyarakat untuk melakukan advokasi. Program ini menghasil kemajuan signifikan dalam mengatasi hambatan hak asasi manusia dan meningkatkan intervensi di Ukraina.
12.	Richards, Julie Angerhofer, et	Penelitian ini dilakukan untuk	Toeri evaluasi RE-AIM Reach,	Metode deskriptif kualitatif	Hasil menunjukan bahwa pelaksanaan L2L ini sudah dijalankan dengan baik, dimulai dengan

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
	al. (2024). "Reducing Firearm Access for Suicide Prevention: Implementation Evaluation of the Web-Based "Lock to Live" Decision Aid in Routine Health Care Encounters."	mengetahui pelaksanaan lock to live (L2L) dan mendukung penerapan L2L selama perawatan primer rutin dan spesialisasi kesehatan mental melalui web dan pertemuan tatap muka.	Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance) dengan indikator cakupan, efektivitas, adopsi, implementasi dan pemeliharaan/kelanj utan		pembaruan bagi dokter untuk menambah URL yang merujuk ke tempat perencanaan keselamatan. Kemudian dilakukan wawancara semi terstruktur untuk mengetahui perspektif pengguna secara efektif. L2L harus terus dijalankan sebagai strategi mitigasi bunuh diri karena tingginya angka bunuh diri saat ini. Alat dan strategi yang dikembangkan untuk proyek ini dianggap akan sangat berguna untuk sistem pelayanan kesehatan secara nasional.
13.	Ferguson, Alyssa L., et al. (2024). "An Implementation Evaluation of the Smartphone- Enhanced Visual Inspection with Acetic Acid (SEVIA) Program for	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan SEVIA sebagai alat untuk peningkatan layanan CCS di Tanzania Utara.	Toeri evaluasi RE- AIM dengan indikator penerimaan, adopsi, kesesuaian, kelayakan, kesetiaan, biaya implementasi, cakupan, dan keberlanjutan.	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SEVIA merupakan alat yang sangat berguna untuk meningkatkan layanan CCS di Tanzania Utara. Penerimaan, adopsi, kesesuaian, dan kelayakan intervensi sangat diakui. Keterbatasan teknis menyebabkan adaptasi terhadap protokol intervensi, hal ini memang wajar terjadi dalam pengembangan awal suatu teknologi.

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
	Cervical Cancer Prevention in Urban and Rural Tanzania." International Journal of Environmental Research and Public Health				
14.	Zelege, G. E., Tafere, T. Z., & Amare, G. (2024). Evaluation of the implementation fidelity of comprehensive emergency obstetric and newborn care at University of Gondar comprehensive specialized	Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi Layanan CEMONC di Rumah Sakit Khusus Komprehensif Universitas Geondar	Teori evaluasi Carrols dengan indikator berupa kepatuhan, kualitas penyampaian, dan dimensi daya tanggap peserta	Metode mix atau campuran	Hasil Secara keseluruhan kesetiaan implementasi layanan CEMONC adalah 75,5%, Kualitas penyampaian, responsivitas peserta dan kepatuhan masing-masing adalah 72,7%, 76,6% dan 77,2%. Keseluruhan ketepatan pelaksanaan layanan CEMONC dilaksanakan dengan ketepatan yang baik. Selain itu, kualitas pemberian dinilai dilaksanakan dengan ketepatan yang cukup

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
	hospital, Northwest Ethiopia				
15.	James Robert M & Darcelle Schouw. (2023). Evaluating the implementation of group empowerment and training (GREAT) for diabetes in South Africa: convergent mixed methods	Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan GREAT untuk diabetes di negara berpendapatan menengah	Teori evaluasi dengan indikator penerimaan, kesesuaian, adopsi, kelayakan, kesetiaan, jangkauan dan biaya.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa GREAT sebagai intervensi yang dapat diterima dan tepat, namun hanya lima dari sembilan provinsi yang mengadopsi GREAT. Manajer di tingkat kabupaten dan fasilitas juga melihat GREAT sebagai intervensi yang dapat diterima dan tepat. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kelayakan termasuk ruang fisik, jumlah staf yang memadai, ketersediaan sumber daya, sistem informasi kesehatan, adaptasi terhadap model layanan (pemilihan fasilitas, pasien, penyesuaian aliran pasien dan sistem janji temu, kepemimpinan dari manajer lokal dan keseluruhan tim klinis) dan dimasukkan dalam sistem untuk peningkatan kualitas.

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada fokusnya, seluruh penelitian di atas dan penelitian penulis keduanya berfokus pada evaluasi pelaksanaan program atau kebijakan. Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu tentang evaluasi pelaksanaan mayoritas adalah teori evaluasi William Dunn, Bridgman dan Davis dan CIPP. Metode yang digunakan adalah dengan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif maupun mix metode. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu pada lokus penelitian. Penelitian ini mengambil lokus di Desa Wisata Jatirejo. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dan teori evaluasi milik Bridgman dan Davis dengan 4 indikator yaitu input, proses, output, outcomes. Penulis juga melakukan analisis terkait faktor penghambat keberjalanan program desa wisata dengan teori faktor penghambat pendorong program oleh Darwin (1999) dengan indikator berupa kepentingan, azas manfaat, budaya. Pembaharuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan teori, belum ada peneliti terdahulu yang melakukan evaluasi pelaksanaan pada lokus ini yaitu Desa Wisata Jatirejo dengan menggunakan teori Brigman dan Dawis.

1.7. Kajian Teori

1.7.1. Administrasi Publik

Administrasi publik dalam pemerintahan berkaitan erat dengan pelayanan, penyediaan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Administrasi dalam pemerintahan merupakan aspek penting sehingga perannya sangat diperlukan,

Administrasi memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya suatu tata kelola pemerintahan. Oleh karenanya, teori administrasi publik dikembangkan sebagai upaya menciptakan efisiensi dalam pemerintah. Teori administrasi publik kemudian semakin berkembang dan identitasnya menjadi jelas. Proses administrasi menjadi pusat perhatian (fokus) dan lembaga pemerintah sebagai tempat praktik (lokus). Sebelum kelahirannya sebagai ilmu yang otonom, administrasi publik dipengaruhi oleh dua cabang ilmu yaitu ilmu politik dan ilmu manajemen (Zein & Septiani, 2023). Gagasan mengenai ilmu administrasi negara juga disampaikan oleh Dwiyanto dalam (Imanuel Jaya, 2021) menyebutkan bahwa Ilmu Administrasi Negara berkembang menjadi sebuah ilmu yang matang dan berhasil mensejajarkan dirinya dengan induknya, yaitu Ilmu Politik dan Ilmu Manajemen.

Definisi administrasi publik menurut Chandler dan Plano (Ade Haryuningsih dkk, 2021) merupakan proses organisir dan koordinasi pada sumberdaya dan personal publik dengan tujuan menciptakan formulasi, implementasi serta pengelolaan keputusan-keputusan dalam suatu kebijakan publik. Pendapat lain yang disampaikan oleh kedua ahli yaitu administrasi publik merupakan seni dan ilmu untuk mengatur public affairs guna menjalankan berbagai tugas yang sudah ditetapkan. Berdasarkan teori Chandler dan Plano ini, ilmu adminisrasi publik dikembangkan guna memberikan pemahaman kepada para penyelenggara pemerintah tentang bagaimana mengatur suatu kebijakan dan keputusan pemerintahan dengan baik. Definisi lain disampaikan oleh Woodrow Wilson bahwa administrasi publik adalah praktik urusan pemerintah untuk melaksanakan pekerjaannya dengan efisien sesuai harapan masyarakat (Kadir,

2020). Kelemahan dari teori Wilson ini adalah tidak adanya kejelasan rinci mengenai praktik urusan pemerintah apa saja yang diatur dalam administrasi publik. Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong dalam (Ade Haryuningsih dkk, 2021) administrasi publik adalah disiplin ilmu yang dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan publik dengan melakukan revisi atau perbaikan dengan pengutamaan di bidang organisasi, sumber daya manusia maupun keuangan. Pendapat ahli diatas secara tidak langsung mendefinisikan administrasi publik sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta mengatasi permasalahan negara dengan pengelolaan organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Seiring perkembangan zaman, administrasi publik menjadi ilmu penting yang wajib dimiliki oleh aktor penyelenggara pemerintah karena berkaitan dengan ilmu pemberian layanan kepada masyarakat. Administrasi publik merupakan ilmu yang mengkritisi tentang aspek penting keberjalanan suatu negara yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ilmu administrasi publik juga berkaitan dengan segala hal terkait kepentingan publik seperti kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara sampai etika yang mengatur penyelenggara negara. Selain itu, administrasi publik juga mempelajari bagaimana mengelola sebuah organisasi publik. Penyelenggaraan pemerintah dipengaruhi oleh model paradigma administrasi publik yang sedang berkembang dari masa ke masa.

1.7.2. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma administrasi publik mencakup berbagai perubahan perkembangan, serta perubahan sudut pandang dari model dan teori dari administrasi publik itu sendiri. Perkembangan ilmu administrasi publik dapat ditelusuri berdasarkan perubahan paradigmanya. Administrasi publik sendiri kerap mengalami pergeseran paradigma sejak awal perkembangannya. Pergeseran paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry (Ikeanyibe et al., 2017) adalah sebagai berikut :

1. Paradigma 1: dikotomi politik-administrasi, 1900–1926.

Dikotomi administrasi publik pada masa ini adalah gagasan adanya pemisahan fungsi politik dan fungsi administrasi pemerintahan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Administrasi dan manajemen dianjurkan memiliki prinsip-prinsip ilmiah yang bisa diterapkan dalam berbagai lingkungan baik publik maupun swasta. Paradigma ini dipelopori oleh Woodrow Wilson dengan menerbitkan artikel tentang empat syarat administrasi publik yang efektif yaitu pemisahan politik dan administrasi, peningkatan efisiensi dengan praktik dan sikap bisnis terhadap operasional setiap harinya, analisis komparatif organisasi publik dan swasta serta melakukan pelatihan manajemen pegawai negeri agar mereka lebih berprestasi sehingga efektivitas meningkat. Paradigma ini menjadi landasan kuat bagi teori administrasi publik dan memperkuat gagasan mengenai dikotomi politik administrasi yang berbeda dengan menghubungkan sesuai fakta dan nilai yang ada.

2. Paradigma 2: prinsip-prinsip administrasi, 1927–1937.

Pada paradigma ini, terdapat identifikasi tentang tujuh prinsip administrasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, koordinasi, pelaporan dan penganggaran (Gulick dan Urwick dalam Ikeanyibe et al., 2017) Prinsip ini muncul karena adanya keyakinan bahwa terdapat prinsip ilmiah dalam administrasi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah. Paradigma ini digambarkan sebagai model administrasi publik tradisional yang menjelaskan ciri-ciri atau asumsi model tradisional yang terdiri dari lima fungsi. Asumsi swasembada merupakan asumsi bahwa pemerintah merupakan aktor mandiri yang bisa bertindak secara mandiri mengenai perekonomian dan masyarakat. Asumsi kendali langsung berarti asumsi bahwa pemerintah mempunyai otoritas puncak dimana mampu menjalankan kendali secara langsung. Asumsi akuntabilitas berarti pejabat bertanggung jawab pada badan legislatif, asumsi ini menunjukkan adanya hubungan administrasi dengan politik dan sosial. Asumsi keseragaman merupakan asumsi bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama pada setiap warga negara. Asumsi sistem pelayanan sipil berisi prosedur penetapan standar dalam manajemen internal sektor publik.

3. Paradigma 3: administrasi publik sebagai ilmu politik, 1950–1970.

Paradigma ketiga ini digambarkan oleh Henry mengenai paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik. Pada masa ini para ilmuwan politik ingin merebut kembali administrasi publik. Para ahli teori manajemen juga

berupaya untuk mengklaim disiplin ilmu administrasi ini. Namun, dikotomi politik-administrasi berhasil dibantah dengan alasan administrasi tidak bisa dipisahkan dari politik dalam pemerintahan. Menurut Gaus dalam (Ikeanyibe et al., 2017) teori administrasi publik juga merupakan teori politik. Administrasi publik pada era ini menekankan pembangunan institusi, birokratisasi, nasionalisasi, serta berbagai peningkatan kapasitas organisasi dan administrasi guna pembangunan nasional dan ekonomi.

4. Paradigma 4: administrasi publik sebagai manajemen, 1956–1970.

Paradigma ini mengacu pada administrasi publik sebagai manajemen (Henry : 1975). Disiplin ini terus bertahan sampai adanya serangan paradigma baru tentang administrasi publik sebagai administrasi publik.

5. Paradigma 5: administrasi publik sebagai administrasi publik, 1970–sekarang (NPM)

Pada era ini, disiplin baru mulai dibangun mengenai administrasi publik sebagai bidang studi yang sifatnya otonom atau berdiri sendiri. Telah terjadi peralihan dari model administrasi publik yang tradisional dan konvensional menjadi model NPM. Paradigma NPM diciptakan sebagai jawaban permasalahan inefisiensi dalam sistem administrasi. NPM berawal dari perpaduan teori ekonomi dan manajemen sektor swasta. Mayoritas perubahan dalam administrasi publik dikategorikan sebagai NPM.

6. Paradigma 6: tata kelola, 1990–sekarang.

Paradigma tata kelola masih memiliki hubungan konseptual dengan NPM dan diyakini akan berhasil. Tata kelola ini memiliki aliran administrasi

publik dari ideologi neoliberal. Menurut Peters (2003) kedua paradigma ini sejalan dengan tujuan yang sama yaitu mengubah sistem pemerintah yang hierarkis dan top down. Tata kelola melibatkan kemitraan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Kemitraan yang dimaksud adalah penduduk lokal, organisasi masyarakat/daerah, sektor publik, sampai sektor swasta.

Penelitian mengenai evaluasi program desa wisata ini termasuk dalam paradigma administrasi publik ke 6 yaitu tata kelola atau *governance*. Hal ini karena evaluasi program pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata berkaitan erat dengan tata kelola yang melibatkan kemitraan berbagai pihak. Guna mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata diperlukan adanya tata kelola yang baik antar aktor yang terlibat dan antar *stakeholder*. Partisipasi masyarakat berperan penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program sehingga dampak positif yang diharapkan bisa dirasakan oleh masyarakat.

1.7.3. Kebijakan Publik

Kebijakan atau *policy* secara umum merujuk pada perilaku seorang aktor atau sekumpulan aktor dalam suatu bidang kegiatan. Istilah kebijakan publik memiliki kaitan erat dengan pemerintahan dan para elit birokrasi yang berurusan dengan publik. Definisi kebijakan publik menurut Gerston adalah usaha yang dilakukan pemerintah guna menyelesaikan masalah publik (Muchtarom et al., 2023). Proses penentuan pada sebuah kebijakan publik dibagi menjadi beberapa

tahapan. Tahapan tersebut diantaranya yaitu identifikasi isu kebijakan publik, mengembangkan proposal kebijakan publik, melakukan advokasi kebijakan publik, melaksanakan kebijakan publik dan mengevaluasi kebijakan publik. Presman dan Wildavsky dalam (Muchtarom et al., 2023) juga menyatakan pandangannya mengenai kebijakan publik bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan sebuah hipotesis, artinya kebijakan mengandung gambaran kondisi awal serta ramalan dari akibat yang akan dirasakan setelah adanya kebijakan. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Bakry dalam (Giantara & Amiliya, 2021) bahwa kebijakan publik adalah sebuah pilihan dan keputusan mengenai suatu tindakan yang dilakukan guna mengelola dan mendistribusikan sumberdaya alam, finansial serta manusia dengan tujuan memenuhi kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat, tentu memiliki arah dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan dengan harapan berhasil menjadi jawaban dari suatu permasalahan.

Menurut Thomas R. Dye dalam bukunya yang berjudul *Understanding Public Policy* (1992) dikatakan bahwa “*public policy is whatever the governments choose to do or not to do*”. Artinya kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan maupun tidak dilakukan, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan apapun juga merupakan sebuah kebijakan publik karena dampak keputusan tersebut sama besarnya dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu (Muchtarom et al., 2023). Secara luas, kebijakan publik sifatnya terencana, tidak terjadi begitu saja melainkan dilakukan dengan perencanaan yang matang oleh aktor pemerintahan, hal ini bertujuan agar setiap kebijakan yang diambil

dapat memberi pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat dan berdampak signifikan pada pemecahan masalah publik. Sementara itu, Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan yang dijalankan dan didasarkan pada tujuan tertentu atas suatu permasalahan yang mendapat perhatian oleh sekelompok aktor yang bersangkutan (Setiawan & Nurcahyanto, 2020).

William Dunn dalam (Fatmariyanti & Fauzi, 2023) menyatakan bahwa istilah *publik policy* secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu “*polis*” artinya negara atau kota, kemudian dikembangkan dalam bahasa latin menjadi “*politia*” atau negara, lalu diubah dalam bahasa inggris menjadi “*policie*” yang berarti menangani masalah publik dan administrasi pemerintahan. Dikutip dari (Ma’ruf et al., 2023) menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1972) kebijakan publik adalah sebuah keputusan tetap yang bercirikan adanya konsistensi dan repetisi tingkah laku dari pembuat kebijakan dan penerima kebijakan. Definisi lain terkait kebijakan publik dikemukakan oleh Frederich dimana dia mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu usulan dari seseorang maupun sekelompok orang dalam pemerintah sebagai upaya penyelesaian dari kegiatan publik yang terhambat dan dilakukan untuk merealisasikan suatu tujuan (Guntur, 2021). Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu keputusan pemerintah yang dibuat untuk mengatasi adanya permasalahan tertentu, merealisasikan kegiatan tertentu dan alat pencapaian tujuan tertentu yang dijalankan melalui lembaga pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara.

1.7.4. Evaluasi Program

Evaluasi merupakan mata rantai dari proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan menurut Mustopadidjaja (Yusri, 2020) didefinisikan sebagai kegiatan untuk melihat dan menilai kegagalan maupun keberhasilan suatu kebijakan publik. Evaluasi dilakukan dengan pemberian nilai atas kegiatan dengan kriteria penilaian yang sebelumnya telah ditetapkan. Pada dasarnya, evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil yang didapat dari diterapkannya suatu kebijakan dengan membandingkan antara target pencapaian kebijakan dan realita hasil yang diperoleh. James P Lester dan Joseph Stewart dalam (Haniyuhana & Katerina Bataha, 2022) menyatakan bahwa tujuan evaluasi kebijakan adalah melihat kemampuan kebijakan memberikan dampak yang diinginkan serta penyebab kegagalan suatu kebijakan. James dan Josep juga berpendapat bahwa tugas evaluasi kebijakan termasuk juga menentukan konsekuensi yang timbul dari adanya kebijakan, dengan cara menggambarkan penilaian dampak keberhasilan dan kegagalan dengan dasar berupa standar atau kriteria yang telah ditetapkan.

Briant & White dalam (Haniyuhana & Katerina Bataha, 2022) menyebutkan pada dasarnya evaluasi kebijakan harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. Lebih lanjut, Nugroho menyatakan gagasannya tentang pentingnya setiap kebijakan publik untuk selalu diawasi dengan evaluasi kebijakan. Hal ini dilakukan untuk menilai keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi yang ada harus bisa melihat kesenjangan antara harapan dan realita. Evaluasi juga dilakukan untuk mengenali dan mencegah adanya

penyimpangan-penyimpangan untuk memastikan sasaran suatu kebijakan dapat tercapai (Winarta et al., 2020).

Evaluasi kebijakan publik sifatnya krusial karena berpengaruh dalam pengambilan keputusan tentang berlanjut tidaknya suatu program. Dari banyaknya kebijakan pemerintah, tidak semua kebijakan bisa berjalan sesuai tujuan, karena itu wajib bagi pemerintah untuk mengevaluasi setiap kebijakan untuk mendapat jawaban efektif tidaknya kebijakan tersebut untuk dijalankan. Evaluasi pada kebijakan publik bersifat kompleks karena melibatkan banyak aspek. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Anderson (Winarta et al., 2020) bahwa *“policy evaluation encompasses the estimation, assessment, or appraisal of a policy, including its content, implementation, goal attainment, and other effects”*. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang mencakup estimasi dan penilaian suatu kebijakan, termasuk juga isinya, implementasinya, pencapaian tujuan, dan dampak lainnya.

Evaluasi dianggap sebagai kegiatan fungsional dan dilakukan dalam setiap tahap kegiatan suatu kebijakan. Menurut Dunn dalam (Sabrina et al., 2023), terdapat beberapa karakteristik yang membedakan evaluasi kebijakan dengan metode analisis kebijakan lain seperti fokus nilai (evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program), interdependensi fakta nilai (evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai), orientasi masa kini dan masa lampau (evaluasi bersifat retrospektif), dan dualitas nilai (nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara). Ketika melakukan suatu evaluasi kebijakan, terdapat beberapa informasi yang dihasilkan dan akan

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan lanjut tidaknya suatu kebijakan, antara lain efisiensi, keuntungan, efektifitas, keadilan, detriments dan manfaat tambahan (Yusri, 2020),

Program merupakan bagian dari suatu kebijakan. Selain evaluasi kebijakan, salah satu jenis evaluasi yang sering dijalankan oleh peneliti adalah evaluasi program. Evaluasi program berarti suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan program sebagai realisasi kebijakan, dengan tujuan mengetahui apakah program ini berjalan dengan rencana atau tidak. Definisi evaluasi program menurut Tyler adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sengaja menggunakan data-data yang sesuai fakta guna untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program yang dijalankan maupun program yang telah berlalu (Bahri et al., 2022).

Secara singkat evaluasi program berarti proses yang dilakukan untuk mengetahui suatu keberhasilan realisasi sebuah program. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam (Wartiningsih, 2021) evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui bagaimana suatu program dilaksanakan secara cermat sehingga efektivitas masing-masing komponen dalam program bisa terlihat. Ketika suatu program dievaluasi, maka evaluator perlu memahami besar mutu dan kondisi hasil pelaksanaan program, kemudian hasil tersebut akan dibandingkan dengan standar kualifikasi tingkat ketercapaian program yang ada sehingga diperoleh kesimpulan berupa keputusan yang sesuai (Lailatul Mufidah, 2021). Definisi lain evaluasi program juga disampaikan oleh Sukardi, dikatakan bahwa evaluasi program adalah proses pengumpulan dan analisis data secara komprehensif guna mengambil sebuah

keputusan penting terkait program yang dinilai (Lailatul Mufidah, 2021). Dalam mengevaluasi program, banyak model yang bisa digunakan, namun keseluruhan model tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan topik evaluasi sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambil keputusan terkait keberlanjutan program. Sukamdinata dalam (Lailatul Mufidah, 2021) menyebutkan bahwa tujuan evaluasi program adalah sebagai berikut

- a. Membantu perencanaan untuk pelaksanaan program
- b. Membantu dalam penentuan keputusan penyempurnaan atau perubahan program
- c. Membantu dalam penentuan keputusan keberlanjutan atau penghentian program
- d. Menemukan fakta-fakta dukungan dan penolakan terhadap program
- e. Memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologis, sosial, politik dalam pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhi program

Cronbach dan Stufflebeam dalam (Diana et al.,2023) menyatakan bahwa evaluasi program dijalankan dengan memberikan informasi kepada pengambil keputusan dan menegaskan bahwa meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program. Lebih lanjut, Patton dalam (Ansyorih, S., Boeriswati et al.,2024) menegaskan bahwa evaluasi berarti pengumpulan informasi yang sistematis mengenai kegiatan, karakteristik, dan hasil dari program untuk membuat penilaian mengenai program ini,

meningkatkan efektifitas program, dan atau menginformasikan keputusan mengenai pengembangan program di masa depan.

1.7.5. Tipe Evaluasi Program

Evaluasi program dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi program pemerintah dilakukan dengan beberapa tipe evaluasi yang disesuaikan dengan tujuan atau hasil analisis yang ingin didapatkan. Evaluasi program menurut Lintjewas, Tulusan, & Egetan dalam (Raviansyah dkk, 2022) terbagi menjadi tiga tipe yaitu :

a. Evaluasi Perencanaan

Evaluasi ini dilakukan pada tahap perencanaan dengan tujuan mengantisipasi dan menilai tentang konsekuensi, pengaruh dan dampak dari ditetapkannya program tersebut. Evaluasi pada tahap ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan program. Pada evaluasi tahap ini, dilakukan analisis mengenai dampak program terhadap lingkungan, sehingga skala prioritas pencapaian tujuan program dapat dirumuskan dengan alternatif yang sesuai.

b. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi tahap ini dilakukan dengan memberikan informasi yang bertujuan untuk perbaikan proses pelaksanaan program agar tujuan awal yang ditetapkan dalam perencanaan bisa tercapai. Evaluasi ini juga dilakukan untuk menjamin setiap tindakan dalam pelaksanaan program dijalankan dengan benar. Evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan program untuk

menghindari dan melakukan perbaikan atas penyimpangan-penyimpangan ketika program dijalankan, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan hasil akhir pelaksanaan program sesuai dengan tujuan awal.

c. Evaluasi Pasca Pelaksanaan

Evaluasi ini dilakukan setelah program dijalankan. Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat pencapaian tujuan program dan dampak yang didapatkan dari adanya program. Pada evaluasi ini, dilakukan juga penilaiann terkait efisiensi, efektivitas dan manfaat program bagi masyarakat.

Menurut Rossi et al dalam (Saputra, 2022) tipe evaluasi program dibagi menjadi lima tipe yaitu :

1. *Evaluation for Program Planning and Development*

Riset evaluasi tipe ini dilakukan dengan tujuan merancang suatu program atau kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hasil evaluasi ini adalah gambaran informasi mengenai optimal tidaknya rancangan suatu program yang akan dijalankan dalam menyelesaikan permasalahan.

2. *Project Monitoring Evaluation Research*

Riset evaluasi ini dijalankan guna menguji kesesuaian implementasi suatu program dengan rancangan awal. Evaluasi ini berkaitan dengan target program dan praktik pelaksanaan program.

3. *Impact Evaluation*

Riset evaluasi ini berkaitan dengan apakah suatu program yang dijalankan ini membawa suatu perubahan yang dikehendaki sebelumnya. Evaluasi dampak ini dilakukan dengan membandingkan suatu program yang berbeda

dan penggunaan upaya baru untuk mengatasi suatu masalah publik. Suatu program yang memiliki dampak adalah program yang bisa membawa perubahan ke arah lebih baik dari suatu masalah.

4. *Economic Efficiency Evaluation*

Riset evaluasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai efisiensi ekonomi dari suatu program untuk kemudian dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan.

Parsons dalam (Saputra, 2022) menyatakan argumennya mengenai tipe evaluasi yang dibagi ke dalam dua tipe yaitu :

1. *Formative evaluation*

Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan ketika sebuah program atau kebijakan sedang dilaksanakan, pada tipe ini dilakukan analisis yang mendalam mengenai kondisi yang mendukung suksesnya pelaksanaan program. Tipe evaluasi formatif dibutuhkan agar dalam fase implementasi program dapat dimonitor arah pelaksanaan program sehingga didapatkan feedback yang berguna untuk pengembangan atau perbaikan selama proses implementasi.

2. *Summative evaluation*

Evaluasi sumatif dilakukan guna mengukur mengenai dampak yang dihasilkan program terhadap suatu permasalahan yang ingin diatasi. Evaluasi sumatif termasuk dalam tahap *post-implementation* yaitu dilakukan saat program sudah selesai dijalankan. Evaluasi ini dilakukan

dengan mengukur atau menilai dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program.

Apabila dikaitkan dengan tipe evaluasi yang dikemukakan di atas, penelitian ini termasuk ke dalam salah satu dari tipe evaluasi menurut Lintjewas, Tulusan, & Egetan yaitu evaluasi pelaksanaan. Jika dikaitkan dengan tipe evaluasi oleh Rossi, penelitian ini termasuk ke dalam tipe *Project Monitoring Evaluation Research* yaitu penelitian evaluasi guna menguji ketepatan pelaksanaan program, dalam hal ini yaitu program pengembangan desa wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

1.7.6. Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi pelaksanaan program adalah pemberian penilaian terhadap suatu program. Penilaian ini dilakukan untuk memberikan umpan balik agar pelaksanaan program bisa berjalan dengan efektif dan efisien (Asri et al., 2021). Menurut Prijambodo dalam (Asri et al., 2021), evaluasi pelaksanaan atau monitoring ini dilakukan dengan mengamati pelaksanaan program dan mengidentifikasi ada tidaknya kesalahan dalam pelaksanaan tersebut, sehingga kesalahan yang ditemukan dapat diperbaiki dan upaya penanggulangan yang tepat dapat ditetapkan sedini mungkin. Arifin dalam (Asih, 2023) menyatakan apabila terdapat perbedaan antara pelaksanaan program dan rencana, maka evaluasi pelaksanaan ini dijadikan alat untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan sehingga ditemukan solusi agar program dapat disempurnakan. Sedangkan menurut Soetomo dalam (Susianti, 2022) evaluasi penting untuk dilakukan sehingga dapat diketahui kemajuan dalam

pelaksanaan program, dalam evaluasi kebijakan ini informasi dikumpulkan sebagai bahan penyempurnaan atas kesalahan yang sebelumnya dilakukan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati dan mendapat gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan suatu program.

1.7.7. Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Pelaksanaan Program

Salah satu pengukuran kriteria evaluasi program yang sering digunakan untuk mengukur program adalah kriteria evaluasi pelaksanaan dari Bridgman dan Davis. Indikator evaluasi pelaksanaan program menurut Bridgman dan Davis dalam (Agustina, 2022) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi pelaksanaan program meliputi:

1. *Input*

Input menfokuskan pada penilaian tentang sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Indikator ini bisa meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lain. *Input* dalam penelitian ini memfokuskan penilaian pada penggunaan sumberdaya yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan program pengembangan desa wisata Jatirejo sehingga tujuan program bisa tercapai.

2. *Proses*

Proses berkaitan dengan penilaian bagaimana program ini ditransformasikan ke dalam suatu pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek metode pengembangan desa wisata. Indikator

proses dalam penelitian ini melihat bagaimana metode dan transformasi pengembangan program desa wisata serta efektivitas dan efisiensi dari proses pengembangan desa wisata Jatirejo.

3. *Output*

Output menfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Dalam indikator ini terdapat catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi. Indikator *output* dalam penelitian ini melihat bagaimana hasil yang diperoleh dari pengembangan desa wisata Jatirejo.

4. *Outcomes*

Outcome ini berfokus menilai tentang dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkait dengan kebijakan. Indikator *outcome* dalam penelitian ini berkaitan dengan dampak yang diterima masyarakat dengan adanya program pengembangan desa wisata di Jatirejo baik dampak positif maupun negatif.

Ketika suatu program atau kebijakan dijalankan, penting untuk memastikan keterkaitan antara konsep *input*, *proses*, *output* dan *outcome*. Hal ini karena keempat elemen ini berdampak pada keberhasilan program. *Input* mencakup sumberdaya yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan sehingga menjadi dasar untuk menjalankan proses kebijakan dengan baik. *Proses* mencakup bagaimana penggunaan dan pengelolaan sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan agar bisa mencapai tujuan. Dalam *proses* dipastikan bahwa input yang ada dimanfaatkan dengan efisien. *Output* merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam

pelaksanaan kebijakan melalui penggunaan *input* dan *proses*. Sedangkan *outcome* adalah dampak yang diharapkan dari adanya pelaksanaan program atau kebijakan, *outcome* digunakan sebagai sumber penilaian akhir atas keberhasilan dan kegagalan program. Oleh karena itu, keempat elemen ini memiliki pengaruh yang besar dalam keberjalanan dan keefektifan program (Nova et al., 2023).

1.7.8. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program

Faktor penghambat merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi melambatnya kegiatan sehingga kegiatan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Ketika suatu program dijalankan, tentu terdapat faktor penghambat keberjalanan program. Menurut Darwin (Arifin, 2020) terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program

1. Kepentingan

Kepentingan menjadi aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan dan tujuan program. Kepentingan ini berkaitan dengan adanya konflik dari kelompok masyarakat tertentu karena muncul golongan masyarakat yang diuntungkan dan masyarakat yang merasa dirugikan atas pelaksanaan program. Kepentingan ini membawa dampak negatif yang berasal dari kelompok masyarakat yang merasa dirugikan yang pada akhirnya menghambat keberjalannya program. Semakin besar konflik kepentingan terjadi dalam pelaksanaan suatu program, maka semakin sulit pula program tersebut untuk dilaksanakan.

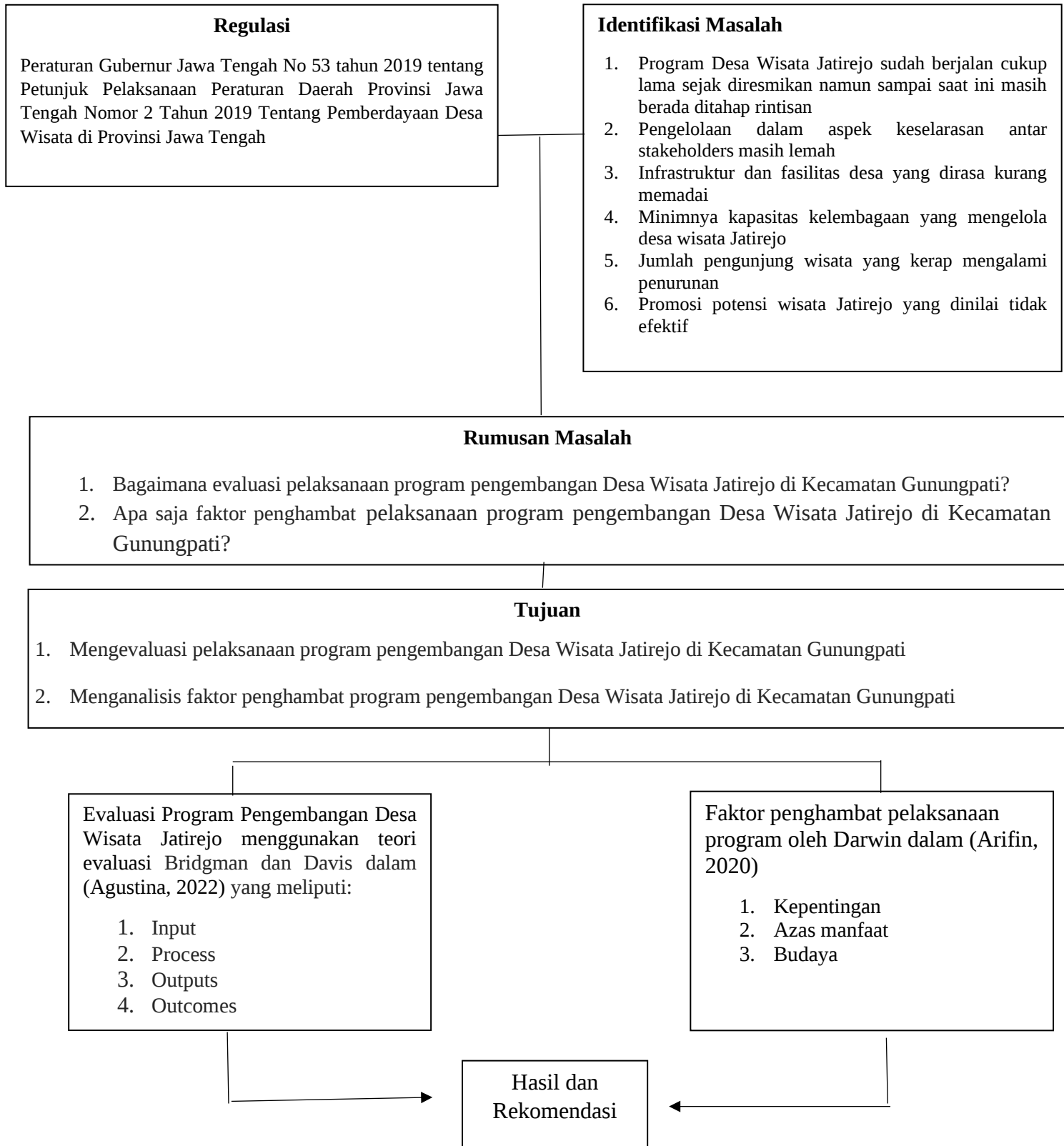
2. Azas Manfaat

Azas manfaat berkaitan dengan manfaat adanya program bagi kelompok sasaran. Setiap program yang dibentuk oleh pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan setiap persoalan masyarakat dan memberi manfaat positif bagi masyarakat. Apabila sebuah program manfaatnya berhasil dirasakan oleh masyarakat, maka dengan sendiri proses pelaksanaan tersebut akan lebih mudah, sebaliknya jika program kurang memberikan manfaat bagi kelompok sasaran, maka pelaksanaannya cenderung lebih sulit.

3. Budaya

Budaya dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program. Budaya disini berkaitan dengan perubahan perilaku kelompok sasaran sebelum dan sesudah adanya program. Ketika sebuah program baru dijalankan, maka terjadi perubahan dalam hal finansial, cara, tempat, perilaku dll. Perubahan ini harus diperhatikan agar perubahan yang terjadi di awal pelaksanaan tidak menimbulkan perlawanan tertentu dari kelompok sasaran, oleh karena itu diperlukan adanya alternatif lain untuk mencegah pemecahan dari resistensi tersebut agar perubahan perilaku dapat dipengaruhi dan dibawa ke arah yang positif.

1.7.9. Kerangka Pikir Penelitian



1.7.10. Operasionalisasi Konsep

1.7.10.1 Evaluasi Program

Evaluasi Program adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menilai bagaimana keberjalanan suatu program dengan tujuan mengetahui efektivitas program dan mengambil sebuah keputusan terkait keberlanjutan program. Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Wisata Jatirejo ini dapat dilakukan dengan beberapa kriteria evaluasi antara lain :

Tabel 1.7

Operasionalisasi Konsep

No	Gejala	Subgejala	Keterangan
1	Input	1. Sumberdaya manusia	1. Kecukupan dan kompetensi SDM penyelenggara program 2. Keterampilan dan pengetahuan masyarakat lokal tentang pariwisata
		2. Sarana dan prasarana	1. Keberadaan sumber daya alam yang menjadi daya tarik wisata 2. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur dasar serta fasilitas program desa wisata
		3. Anggaran	1. Kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan program 2. Kecukupan anggaran dengan kebutuhan program

No	Gejala	Subgejala	Keterangan
2	Proses	1. Transformasi	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sosial 2. Inovasi dan adaptasi pengembangan tren wisata
		2. Metode	1. Pengenalan program kepada masyarakat 2. Sistem perencanaan dan pengendalian program 3. Pemilihan bentuk produk atau jasa desa wisata 4. Koordinasi dan komunikasi seluruh <i>stakeholder</i>
		3. Efektivitas	1. Penggalan potensi daya tarik 2. Pelatihan pemberdayaan masyarakat
		4. Efisiensi	1. Pengelolaan daya tarik wisata kolang-kaling dan river tubing 2. Pendampingan dan monitoring pengembangan program wisata
3	Output	1. Produk Desa Wisata	1. Jenis produk wisata yang ditawarkan 2. Peningkatan jumlah usaha lokal dan jasa pariwisata 3. Kesesuaian antara ekspektasi dan realita dalam pembangunan desa wisata 4. Kepuasan wisatawan terhadap produk yang ditawarkan
		2. Perbaikan fasilitas desa	1. Peningkatan kualitas jalan akses

No	Gejala	Subgejala	Keterangan
			2. Pembangunan fasilitas umum 5. Perbaikan fasilitas akomodasi
4	Outcome	1. Dampak positif adanya program	1. Peningkatan pendapatan dari sektor wisata 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 3. Dampak positif lain yang dirasakan penerima akibat adanya program
		2. Dampak negatif adanya program	1. Dampak negatif yang dirasakan penerima akibat adanya program 2. Ketergantungan ekonomi pada sektor wisata

1.7.10.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah setiap hal yang menghambat pelaksanaan program pengembangan desa wisata Jatirejo.

Tabel 1.8

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program

No	Gejala	Subgejala	Keterangan
1.	Kepentingan	1. Perbedaan Kepentingan	1. Ketidaksepakatan antar pengelola desa wisata 2. Tingkat keselarasan dalam metode/cara antar pengelola 3. Perbedaan prioritas pemangku kepentingan

No	Gejala	Subgejala	Keterangan
		2. Perbedaan Pemahaman Masyarakat	1. Perbedaan sudut pandang mengenai pelaksanaan desa wisata 2. Tingkat dukungan dan penolakan masyarakat
2.	Azas Manfaat	1. Manfaat program yang dirasakan masyarakat	1. Relevansi program dengan kebutuhan masyarakat 2. Keberhasilan program dalam memberikan manfaat
		2. Keberhasilan penyelesaian masalah	1. Dampak program terhadap permasalahan di masyarakat 2. Kesuksesan program dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
3.	Budaya	1. Perubahan kebiasaan masyarakat	1. Kesesuaian program dengan kebiasaan masyarakat 2. Tingkat kesulitan masyarakat untuk beradaptasi dengan adanya program
		2. Nilai dan norma masyarakat	1. Kesesuaian program dengan nilai dan norma masyarakat 2. Keraguan masyarakat terhadap nilai dari teknologi atau inovasi baru

1.7.11. Argumen Penelitian

Penelitian dengan fokus evaluasi dilakukan untuk mengambil keputusan dengan menganalisis data serta informasi tentang topik terkait yang kemudian akan dibandingkan dengan kriteria, standar atau tolak ukur yang digunakan sebagai

pembandingan dengan data yang diperoleh (Rahmi Pertiwi et al., 2023). Hakekatnya, evaluasi ini adalah proses sistematis yang sifatnya berkelanjutan dengan tujuan menentukan nilai dan arti dari sesuatu yang didasarkan pada pertimbangan melalui kriteria tertentu dalam rangka membuat suatu keputusan. Dalam sektor publik, evaluasi menjadi salah satu elemen terpenting jika dikaitkan dengan kebijakan atau program, Evaluasi perlu dilakukan dalam setiap program atau kebijakan yang diambil pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat (Elsa Monika & Nur Laila Meilani, 2023). Adanya evaluasi memungkinkan pemerintah mengambil keputusan tentang keberlanjutan program dengan melihat dampak program bagi masyarakat dan keberhasilan program untuk mengatasi permasalahan yang ada,

Penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Wisata Jatirejo ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program desa wisata Jatirejo dan apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini penting untuk mengetahui apakah tujuan dan manfaat yang diharapkan dari adanya program berhasil dirasakan oleh masyarakat Jatirejo serta untuk mengetahui penghambat pelaksanaan program desa wisata. Oleh karena itu, peneliti mengambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana evaluasi pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Jatirejo dan apa saja faktor penghambat pelaksanaan Program Desa Wisata Jatirejo. Peneliti berargumen bahwa program ini masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan desa wisata. Beberapa tahun setelah diresmikan, Jatirejo masih menduduki desa wisata dengan status rintisan. Penurunan jumlah

wisatawan setiap bulannya juga menjadi masalah di Jatirejo. Untuk mengevaluasi Program desa wisata Jatirejo peneliti menggunakan teori evaluasi milik Bridgman dan Davis dengan memerhatikan variabel yang meliputi Input, Process, Outputs, dan Outcomes. Sedangkan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat penyelenggaraan program desa wisata penelitian ini akan menggunakan teori Penghambat pelaksanaan program oleh Darwin (1999) yang terdiri dari kepentingan, azas manfaat, budaya. Urgensi dan nilai penelitian ini terletak pada hasil dimana hasil yang diperoleh nanti akan menyatakan tentang pelaksanaan program desa wisata Jatirejo secara umum terkait dengan pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Riset ini penting dilakukan mengingat evaluasi adalah tahapan terpenting untuk mengukur efektif tidaknya suatu program sehingga bisa diambil keputusan mengenai keberlanjutan program di masa mendatang.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Purba et al., 2021) penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini. dengan interpretasi yang benar. Menurut Suharsimi Arikunto dalam (Hamdan Ridwan, 2023) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang

hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam mengelola data, pendekatan kualitatif tidak menggunakan pengelolaan statistik. Pendekatan kualitatif didasarkan pada fakta keadaan di lapangan dan teori yang relevan tentang keadaan tersebut. Output data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah uraian tertulis dari subjek terkait topik yang diamati.

Penelitian ini tergolong tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena menganalisis, mengobservasi, mempelajari serta mendeskripsikan tentang topik yang diteliti yaitu evaluasi pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Jatirejo. Penulis menafsirkan data yang didapat melalui pernyataan responden sehingga menemukan jawaban permasalahan tentang evaluasi program desa wisata ini. Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan memberikan gambaran pelaksanaan program desa wisata, faktor penghambat implementasi serta dampaknya adanya program yang dirasakan oleh masyarakat. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, data yang diperoleh penulis akan dituangkan dalam bentuk uraian naratif tentang situasi dan kondisi topik penelitian.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilaksanakan dan peneliti akan mengamati keadaan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian sehingga memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan (Pakpahan et al., 2021). Peneliti menetapkan Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

menjadi situs penelitian mengingat daerah ini menjadi salah satu kota yang mengimplementasikan program desa wisata.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan atau seseorang yang bisa memberikan informasi kepada seorang peneliti terkait situasi dan kondisi yang berhubungan dengan topik penelitian (Abduh et al., 2021). Informasi yang diberikan oleh subjek penelitian ini akan menjadi dasar dalam menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dan menentukan hasil penelitian. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan subjek penelitian adalah *purposive sampling* agar bisa memperoleh informasi yang rinci dari subjek penelitian yang relevan, sehingga peneliti bisa memperoleh data yang tepat.

Teknik *purposive sampling* menurut Arikunto dalam (Amin et al., 2023) adalah suatu teknik pengambilan data yang sifatnya tidak acak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tertentu untuk memperoleh target. Menurut Sugiyono dalam (Saat & Mania, 2020) *purposive sampling* berarti teknik yang dipakai untuk menentukan sampel penelitian dengan suatu pertimbangan, sampel diambil berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu :

1. Lurah Jatirejo, merupakan kepala pemerintahan tertinggi di tingkat desa, sehingga memiliki otoritas dan tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan program pengembangan desa wisata.

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Semarang, merupakan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dan berwenang mengatur segala urusan tentang desa wisata di Semarang dan memastikan kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan program desa wisata diimplementasikan dengan baik
3. Pokdarwis Jatilanggeng, merupakan pengelola inti desa wisata Jatirejo dan penanggungjawab penuh dalam menjalankan program desa wisata Jatirejo
4. Karang Taruna, merupakan pengelola program desa wisata Jatirejo khususnya river tubing
5. Kelompok UMKM Kolang Kaling, merupakan target dan alasan usaha ditetapkannya Jatirejo sebagai desa wisata. Mereka merupakan kelompok yang diberdayakan dalam pengembangan desa wisata Jatirejo.
6. Penduduk Lokal, merupakan kelompok sasaran yang terlibat langsung dalam pengembangan program desa wisata dan informan yang berpengalaman dalam implementasi program desa wisata ini.
7. Wisatawan, merupakan indikator utama keberhasilan program, sebagai pengguna langsung yang menilai daya tarik dan kualitas fasilitas desa wisata, serta mengevaluasi apakah program mampu memenuhi harapan pengunjung.

Kriteria yang digunakan dalam memilih subjek penelitian ini yaitu:

1. Subjek adalah warga kampung Jatirejo yang tergolong menjadi pengelola desa wisata Jatirejo
2. Subjek merupakan karyawan atau organisasi pelaksana program desa wisata di Kecamatan Gunungpati

3. Subjek terlibat langsung dalam pelaksanaan program baik dan merasakan dampak keberadaan program.
4. Subjek tidak hanya terlibat namun juga paham seluk beluk pelaksanaan program.

Penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Neuman dalam (Asari et al., 2023) teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampling dengan mengidentifikasi dan memilih sampel dari suatu jaringan rantai yang saling terhubung. Menurut Akhmad Fauzi (Asari et al., *snowball sampling* adalah berarti mengambil sampel secara berantai atau multilevel. Teknik ini dilakukan dengan jumlah sampel yang kecil, kemudian membesar ibarat bola salju menggelinding.

Pada penelitian di desa wisata Jatirejo ini, teknik *snowball* digunakan ketika data yang didapat di lapangan belum memenuhi kapasitas, dengan menggunakan teknik ini sumber data yang awalnya sedikit menjadi lebih besar. Hal ini karena sumber data yang sebelumnya ditetapkan ternyata tidak mampu memberikan data yang memuaskan, sehingga peneliti perlu menambah informan lain yang relevan. Ketika ketujuh informan kunci yang telah ditetapkan sebelumnya belum memenuhi kapasitas data yang dibutuhkan, maka penulis akan melakukan teknik *snowball* dengan menambah atau mengganti informan sebelumnya dengan informan yang lebih cakap dan paham mengenai pertanyaan yang diajukan. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan berhasil menjawab pertanyaan dalam penelitian.

1.8.4. Jenis Data

Bungin dalam (Abduh et al., 2021) mendefinisikan data sebagai bahan keterangan tentang suatu objek penelitian, sedangkan jenis data merupakan bentuk pendefinisian data sebagai bahan keterangan dan hasil dari suatu penelitian. Jenis data ini pilihan yang ingin digunakan penulis untuk mendeskripsikan atau menjelaskan hasil data yang diperoleh baik berupa kumpulan fakta informasi maupun suatu pengukuran atau angka. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau hitungan, melainkan bentuk fenomena alamiah dimana peneliti menjadi instrumen kunci (Fadli, 2021).

Data kualitatif sifatnya deskriptif dan berfokus pada interpretasi subjek tentang objek yang diteliti. Oleh karena itu, penggunaan jenis data kualitatif akan memudahkan peneliti untuk mengkategorikan dan menginterpretasikan keterangan subjek tentang pengalamannya dalam mengelola daya tarik Desa Jatirejo. Jenis data ini biasanya berupa transkrip wawancara, catatan ataupun dokumen yang relevan. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa transkrip wawancara dan dokumen ulasan masyarakat tentang gambaran umum program pemberdayaan masyarakat desa wisata, pelaksanaan program dan kinerja organisasi pelaksana program desa wisata. Penggunaan data kualitatif memberi pemahaman yang lebih jelas tentang objek yang diteliti dengan menggunakan interpretasi makna, hubungan, dan pola dari data yang didapatkan. Jenis data ini dipilih agar memudahkan penulis untuk memaknai pola hubungan dari data wawancara pengelola desa dan pemerintah

pengelola desa wisata sehingga bisa ditarik kesimpulan secara jelas bagaimana pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Jatirejo.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data menurut Arikunto dalam (Octavia, 2020) adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Artinya sumber data ini merupakan asal dimana peneliti mendapatkan sumber informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Edi Riadi dalam (Octavia, 2020), sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data penelitian Sumber data adalah segala sesuatu yang berperan memberi informasi tentang penelitian yang dilakukan. Sumber data didapatkan menyesuaikan pada fokus dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono dalam (Susianti, 2022) data primer adalah sumber data penelitian yang langsung memberikan informasi data kepada peneliti tanpa melalui perantara. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Jatirejo yang selama ini telah mengelola daya tarik wisata. Jadi, data dalam penelitian ini didapatkan langsung dari informan yang pernah atau masih menjalankan program. Penulis datang langsung ke lingkungan masyarakat Semarang untuk mendapatkan data mengenai pengalaman mereka ketika menerima desanya ditetapkan sebagai

desa wisata. Penulis juga melakukan wawancara kepada lembaga pengelola desa wisata di Kelurahan Jatirejo untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program yang selama ini mereka jalankan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono dalam (Susianti, 2022) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada penlit, tetapi harus melalui sumber ketiga baik orang lain maupun dokumen, sehingga peneliti tidak mendapat atau tidak perlu mengumpulkan data secara langsung. Data sekunder bisa berupa catatan, histori, bukti, laporan, arsip maupun data dokumenter. Peneliti mendapatkan sumber data sekunder melalui penelitian terdahulu tentang program pengembangan Desa Wisata Jatirejo, jurnal penelitian yang berkaitan dengan program desa wisata, serta data statistik jumlah pengunjung dan pendapatan masyarakat sebelum dan sesuai adanya program.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (Fadli, 2021) merupakan langkah paling penting dalam penelitian mengingat bahwa tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data menjadi langkah penting karena data yang relevan hanya bisa didapat melalui metode pengumpulan data yang tepat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 2 metode yaitu :

1. Wawancara

Menurut Meleong dalam (M. Putri & Sumardi, 2023) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada masyarakat Jatirejo yang pernah atau masih mengelola daya tarik wisata Jatirejo. Peneliti melakukan percakapan tatap muka langsung dengan masyarakat Jatirejo yang pernah menjalankan program, kemudian peneliti memberikan beberapa pertanyaan seputar pelaksanaan desa wisata. Dalam melakukan wawancara, jenis wawancara yang dipilih peneliti adalah semi terstruktur. Menurut Sugiyono (2018) wawancara semi terstruktur diartikan sebagai wawancara dengan mengajukan pertanyaan bebas namun tetap sesuai pedoman wawancara yang sebelumnya sudah dirancang. Jadi, peneliti hanya menulis point-point yang akan ditanyakan saat wawancara, namun sifatnya tidak detail. Peneliti akan melakukan improve dan mengembangkan pertanyaan menyesuaikan dengan kondisi lapangan nanti. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh tentang program BPNT sifatnya lebih detail dan terbuka sehingga permasalahan lebih mudah diinterpretasikan dan diuraikan. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada warga Jatirejo terkait pengalaman mereka menjalankan program desa wisata, apakah mereka mendapatkan kemudahan dengan dijalankannya program desa wisata dan kendala apa yang mereka dapat dalam pelaksanaan program. Informasi yang didapat sifatnya beragam sesuai dengan pengalaman

masing-masing informan. Peneliti memilih menggunakan teknik wawancara agar bisa memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang permasalahan implementasi program desa wisata Jatisari. Pendapat para informan bisa dipahami dan dihubungkan dengan teori evaluasi, sehingga bisa terlihat perbandingan antara apa yang seharusnya terjadi dengan realita yang ada di lapangan.

2. Dokumentasi

Pada teknik pengumpulan data, dokumentasi berkaitan dengan benda tertulis seperti dokumen, peraturan, buku, majalah, catatan, notulen dll yang berkaitan dengan topik penelitian (Sonia Sischa Eka Putr, Novita Sari, 2024). Peneliti mengambil dokumentasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program baik dari media sosial maupun portal berita yang kemudian dikumpulkan untuk diolah menjadi deskripsi data yang mudah dipahami dan dibaca. Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dokumentasi melalui terjun lapangan di lingkungan Jatirejo dan organisasi pelaksana program desa wisata. Peneliti juga mengumpulkan data dokumentasi dari portal berita yang relevan dengan topik yang diteliti. Berita yang ada seringkali membahas mengenai program desa wisata Jatirejo sehingga bisa digunakan menjadi data penelitian.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian (Ardiansyah et al., 2023). Observasi dilakukan dengan melihat situasi nyata di lingkungan yang dirancang untuk penelitian. Observasi ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengamati

interaksi sosial, perilaku dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Bogdan & Biklen, 2017). Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan mendatangi langsung desa wisata Jatirejo untuk mengetahui kondisi langsung objek penelitian, baik mengenai permasalahan pengelolaan, sarana prasarana maupun dampak desa wisata bagi masyarakat sekitar.

1.8.7. Analisis dan Intervensi Data

Analisis dan intervensi data adalah proses menyusun kelompok data kedalam suatu pola, mengurutkan pola-pola data, menjabarkan lebih lanjut dari makna data, serta memilih data mana yang penting dan berperan memberi penegasan pada kesimpulan (Abduh et al., 2021). Penelitian ini menggunakan beberapa proses analisis data yaitu :

1. Data Requirement Gathering

Pada tahap ini, penulis mengidentifikasi data apa saja yang akan digunakan dan dibutuhkan untuk dianalisis. Peneliti memutuskan bahwa data yang dibutuhkan yaitu keterangan dari para pengguna secara jelas dan rinci, serta data statistika dari lembaga yang bersangkutan. Penelitian ini kemudian menggunakan data berupa wawancara dan dokumentasi, hasil kedua data akan dianalisis untuk mendapatkan hasil mengenai evaluasi pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Jatirejo.

2. Data Collecting

Tahap selanjutnya setelah mengidentifikasi kebutuhan data yaitu tahap pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan berbagai data dokumentasi yang

berkaitan dengan pelaksanaan program melalui berbagai platform seperti sosial media, portal berita dll.

3. Data Cleaning

Tahap ini dilakukan dengan menyeleksi data yang dirasa tidak berguna untuk kebutuhan penelitian. Data yang telah didapat tentang program desa wisata Jatirejo baik dari masyarakat maupun instansi akan ditajamkan, peneliti kemudian mendapatkan inti data yang relevan dengan permasalahan program desa wisata Jatirejo. Pada penelitian ini, data cleaning dilakukan pada data wawancara dan dokumentasi yang telah penulis dapatkan untuk kemudian diseleksi dan dibuang data yang tidak relevan/penting untuk memperoleh inti dari data-data mengenai evaluasi pelaksanaan program Desa Wisata Jatirejo.

4. Data Analysis

Pada analisis data penelitian ini, data yang keabsahannya sudah diuji diinterpretasikan sesuai prosedur penelitian terkait evaluasi kebijakan berdasarkan teori Bridgman dan Davis. Proses analisis dilakukan dengan mencari perbandingan antara kriteria program yang seharusnya terjadi dengan realita yang ada. Tahap analisis data dilakukan penulis dengan menganalisis evaluasi pelaksanaan program pengembangan desa wisata Jatirejo berdasarkan elemen-elemen keberhasilan program yang disampaikan Brigman. Hal ini dilakukan untuk mengetahui elemen apa yang belum terlaksana dengan baik dan apa yang membuat pelaksanaan program ini

masih terdapat permasalahan. Analisis implementasi ini akan menjelaskan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Data Interpretation

Melalui hasil analisis dan perbandingan, penulis akan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang ada akan mengungkapkan makna dari hasil penelitian menggunakan kalimat yang jelas, mudah dipahami khalayak, dan konsisten berkaitan dengan judul, rumusan masalah dan tujuan. Dalam menarik kesimpulan, peneliti membandingkan secara konseptual kesesuaian makna antara pernyataan informan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dengan membandingkan keterangan informan tentang pengalamannya dalam mengelola atau berkunjung di desa wisata Jatirejo dengan permasalahan yang peneliti ambil. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis hubungan permasalahan evaluasi dengan teori evaluasi kebijakan yang peneliti pilih.

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data menurut Batini dalam (Ardiansyah et al., 2023) adalah bagian dari tata kelola data, kualitas data mempunyai pengertian tentang kelengkapan dan keakuratan data. Keakuratan mengandung pengertian sejauh mana data tersebut benar, dapat diandalkan dan nilai data yang disimpan dalam basis data sesuai dengan kenyataan. Kualitas data penelitian kualitatif ditentukan melalui keabsahan data, kebenaran data dan informasi, serta kepercayaan dan keotentikan suatu data

hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis analisis kualitas data yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber menurut Sugiyono dalam (Fadli, 2021) adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan menguji kredibilitas suatu data dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya. Penelitian ini menerapkan metode triangulasi sumber data untuk mengetahui kredibilitas data. Menggunakan triangulasi sumber data, peneliti membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan terkait pengalaman mereka dalam pelaksanaan program dan faktor penghambatnya. Peneliti kemudian membandingkan jawaban wawancara dengan keadaan sesungguhnya di lapangan, dan data sosial media untuk mengetahui apakah pernyataan informan tersebut sesuai dengan keadaan asli yang diamati peneliti. Kegiatan ini dilakukan untuk membuktikan tentang kebenaran dari data yang didapatkan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi sumber menurut Sugiyono dalam (Fadli, 2021) adalah teknik kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek sumber data yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan pengecekan data yang

sumbernya sama dengan teknik yang berdeda. Penelitian ini menerapkan triangulasi teknik dengan mengecek keabsahan data hasil observasi atau dokumentasi menggunakan teknik wawancara untuk memastikan keabsahan data.